



## **Etika Politik Perspektif Bahtiar Effendy**

**Ahmad Bashori<sup>1</sup>**

**Zainun Kamaluddin Fakhri<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam

Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Kota Tangerang Selatan, Banten, Indonesia

<sup>1</sup>[ahmad.bashori16@mhs.uinjkt.ac.id](mailto:ahmad.bashori16@mhs.uinjkt.ac.id), <sup>2</sup>[zainun.kamaluddin@uinjkt.ac.id](mailto:zainun.kamaluddin@uinjkt.ac.id)

### **Abstrak:**

*Penelitian ini bertujuan untuk memahami pemikiran Bahtiar Effendy mengenai Etika Politik. Adapun rumusan masalah yang akan digali ialah: “Pada Teori Umum Tentang Etika, Ke manakah Kecondongan Konsep Pemikiran Etika Politik Menurut Bahtiar Effendy?” Metodologi yang digunakan adalah deskriptif analisis dan teknik pengumpulan data menggunakan kajian pustaka (library research). Dalam penulisannya, peneliti menggunakan beberapa buku karya Bahtiar Effendy sendiri sebagai sumber primer dan peneliti juga mengumpulkan sumber sekunder berupa buku, jurnal, skripsi, artikel, dan web berita-berita sebagai data penunjang untuk memahami dan menyelami objek pemikiran yang diteliti. Dalam penelitian ini, Bahtiar menyorot dinamika, di antaranya; bagaimana menautkan etika dan moralitas pada politik. Selain itu, Bahtiar juga menyoroti kekeliruan pada banyaknya partai di sistem demokrasi yang tergolong suatu anomali, moralitas peserta pemilu, dan fatsun politik: menyikapi menang-kalah pemilu. Pada penelitian ini peneliti mendeskripsikan pemikiran Bahtiar yang tertuang dalam buku-buku karyanya kemudian menganalisis setiap poin pemikirannya dan menyandingkan pokok-pokok pemikiran itu ke dalam fenomena-fenomena politik yang masih relevan.*

**Kata Kunci:** Anomali, Demokrasi, Bahtiar dan Moralitas, Modal Sosial

## Pendahuluan

Dalam sejarah kemunculan agama Islam, selain persoalan keyakinan ada persoalan politik yang menjadi pembahasan penting dalam Islam.<sup>1</sup> Hal ini dapat kita lihat pada kisah Nabi Muhammad SAW dalam menyiarkan agama Islam di Makkah, pada waktu itu pengikut umat Islam didominasi oleh kalangan budak dan kelas bawah sehingga tidak bisa menentang kekuasaan kaum Quraisy yang merupakan kaum elite di kota Makkah. Oleh karena itu Nabi bersama para sahabat berhijrah ke kota Yastrib<sup>2</sup> agar beliau mendapat perlindungan dan membentuk masyarakat yang kuat untuk melawan kaum Quraisy Makkah.

Di kota Madinah umat Islam mengalami perubahan yang signifikan. Kalau di Makkah mereka merupakan golongan kelas rendah dan lemah sehingga seringkali tertindas, di kota Madinah mereka mempunyai kedudukan yang baik. Selain mendapat perlindungan, Nabi juga menjadi pemimpin di Madinah. Kepemimpinan ini menjadikan Muhammad tidak hanya mempunyai peran sebagai utusan Allah saja – yang mengurus spiritual keagamaan – tetapi perannya juga sekaligus merangkap sebagai seorang politisi yang mengurus permasalahan negara. Dengan demikian Sosok Nabi secara bertahap berubah menjadi seorang Negarawan.<sup>2</sup>

Salah satu keberhasilan Nabi dalam memimpin negeri Madinah ialah Islam berhasil menyintesis konsep etika dalam konteks sosial dan politik dengan menyatukan masyarakat yang beragam suku dan keyakinan dengan membuat konstitusi tertulis yang akrab kita sebut “Piagam Madinah”. Konstitusi ini menjamin semua hak masyarakat Madinah, baik yang Islam, Yahudi bahkan kaum pagan sekalipun. Piagam ini bersifat Pluralisme positif, yakni menghormati para penganut agama yang berbeda namun tetap memegang teguh terhadap agama mereka masing-masing.<sup>3</sup> “Piagam Madinah” juga menjadi bukti adanya kesepakatan dan negosiasi politik antara komunitas Islam, Kristen, Yahudi, Kaum Pagan di Madinah atas inisiatif Nabi.

---

<sup>1</sup> Harun Nasution, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya* (Jakarta: UI Press, 2002), jilid 1, h. 92.

<sup>2</sup> Philip K. Hitti, *History of the Arabs* (Zaman: Jakarta, 2018). Terj. R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, h. 145-146.

<sup>3</sup> Kuntowijoyo *Identitas Politik Umat Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2018), h.204

Kembali pada pembahasan awal, salah satu persoalan politik ialah etika. Menurut Plautus<sup>4</sup> dalam karyanya yang berjudul *Asinaria* dikatakan bahwa manusia adalah “*Homo Homini Lupus*,” artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Walaupun istilah ini muncul pada tahun 195 SM tetapi masih relevan untuk fenomena yang terjadi dewasa ini, terutama dalam pembahasan politik, bahkan istilah ini dikemukakan kembali oleh Thomas Hobbes (1588-1679) dalam menjelaskan fenomena sosial, dikatakan bahwa manusia cenderung menginginkan kenikmatan dan menjauhi rasa sakit sehingga mereka saling bersaing.<sup>5</sup>

Menurut Bahtiar Effendy ada tiga faktor penyebab para pemegang kekuasaan tidak dapat menjalankan sebagaimana mestinya. *Pertama*, adanya ketidaktersediaan pemahaman atau kelalaian bahwa kekuasaan merupakan amanah atau *public trust* yang seharusnya dijadikan sebagai landasan filosofisnya.

Sebelum seseorang terpilih menjadi pemimpin, terlebih dahulu ia membuat kontrak sosial di hadapan masyarakat dan pada saat ia terpilih menjadi pemimpin tetapi ia tidak memegang teguh akan kontrak sosial itu maka ia termasuk orang yang zalim, mengkhianati amanah yang telah mereka buat. Dalam pandangan Islam, Allah berfirman dalam al-Qur’an: *Dan janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu* (Q.S al-Anfal/8: 27). *Kedua*, tidak adanya instrumen pendukung, yakni sistem yang mengawasi dan mengontrol pelaksanaan kekuasaan. Seperti, Undang- Undang dan lembaga pengawasan lainnya. Karena kekuasaan itu merupakan *public trust* maka ia bersifat *accountable*. Terjadinya fenomena kasus korupsi birokrasi disebabkan karena lemahnya pengawasan pihak legislatif. Legislatif yang berada di bawah eksekutif tidak menguntungkan bagi pengawasan sehingga birokrasi tidak transparan.<sup>11</sup> *Ketiga*, terdapat aura dan godaan dalam kekuasaan. Baik secara psikologis seperti perlakuan negara dalam memperlakukan para elit politik secara istimewa dan secara materiil berupa harta kekayaan dan berbagai tunjangan yang diberikan.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Maccius Plautus (254 SM – 184 SM) penulis drama Romawi dari periode Latin Kuno

<sup>5</sup> Masykur Arif Rahman, *Buku Pintar Sejarah Filsafat Barat*, (Jakarta: IRCiSoD, 2013), h. 256

<sup>6</sup> Bahtiar Effendy, *Jalan Tengah Politik Islam: Kaitan Islam, Demokrasi, dan Negara Yang Tidak Mudah*, (Jakarta: Ushul Press, 2005), h. 69-71.

Ketidaksanggupan untuk mengatasi pelbagai faktor diatas menyebabkan Adanya kasus tidak sedap yang seringkali terjadi seperti maraknya KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), suap-menyuap, penggelembungan suara, keberpihakan elit politik terhadap pengusaha ketimbang rakyat kecil dan lain-lain. Hal ini membuat Nilai-nilai kemanusiaan dalam fenomena perpolitikan kembali dipertanyakan.

Pemahaman sekularisasi akan moral dengan politik turut menjadikan politik dipandang menjadi “sesuatu yang kotor”. Pengertian moral mengacu pada baik dan buruknya manusia sebagai manusia.<sup>7</sup> Sedangkan politik mengacu kepada kekuasaan. Dalam rangka hasrat untuk selalu mengejar kekuasaan, demi melanggengkan kekuasaan para pelaku politik acapkali menghiraukan aspek moral karena tidak hanya dianggap mengganggu tekad dalam mengambil tindakan tertentu, melainkan tidak relevan. Bila menggunakan pandangan seperti ini maka ia akan terjebak dalam pemahaman Machiavellian, membuat jurang perbedaan antara politik dan etika demi tercapainya suatu tujuan.<sup>8</sup> Politik tanpa dilandasi oleh etika akan menyebabkan kehilangan orientasi dalam memegang kekuasaan dan terjadinya praktik kebijakan sesuai kepentingan sendiri maupun kelompoknya.

Dampak dari fenomena diatas mengakibatkan efek domino, tidak hanya berhenti sampai pada tataran elit politik saja. melainkan rakyat terkena imbasnya. Apalagi kasus-kasus yang telah dipaparkan diatas sudah bukan barang baru lagi, sehingga dianggap lumrah oleh masyarakat umum. Akibatnya paradigma rakyat dalam memilih pemimpinnya kini bukan didasarkan atas kualitas calon pemimpin tetapi atas jual-beli suara dan keberpihakan kebijakan yang digaungkan oleh calon wakil rakyat itu. Dampaknya rakyat akan semakin apatis bahkan lebih jauh lagi akan adanya krisis legitimasi.

Penulis tertarik dengan pandangan Bahtiar Effendy, menurutnya penyandingan antara etika dan politik bisa menjadi suatu resep untuk memperbaiki kehidupan politik dewasa ini. Meskipun keduanya merupakan dua hal yang berbeda. Etika sebagai perangkat nilai untuk menuntun kehidupan ke arah yang baik. Sedangkan politik sebagai instrumen untuk membangun kehidupan yang

---

<sup>7</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, (Jakarta: Kanisius, 1987), h. 19.

<sup>8</sup> Agustinus W. Dewantara, *Filsafat Moral: Pergumulan Etis Keseharian Hidup Manusia*, (Yogyakarta: Kanisius, 2017), h. 70.

penuh dinamika, perbedaan dan persaingan menjadi lebih nyaman, walaupun dalam praktiknya politik berisi sarat akan intrik, pengkhianatan, bahkan rela memotong hak hidup orang demi mencapai keberhasilannya dan sebagainya. Namun politik dapat dikaitkan dengan etika karena pada dasarnya, politik sarat dengan hal-hal yang bersifat baik. Oleh karena itu terdapat urgensi untuk mengaitkan etika dan politik dewasa ini sehingga dinamika polemik dalam perpolitikan tidak semata-mata diarahkan untuk merealisasikan gagasan *who gets what, when, how* (siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana) tetapi menarik kembali politik ke arah kejujuran dan sifat-sifat kemanusiaan.<sup>9</sup>

Sejalan dengan pernyataan di atas, Aristoteles juga berpendapat bahwa antara etika dan politik terdapat hubungan yang paralel. Namun keduanya memiliki Tujuan sama, yakni agar mencapai terbinanya warga negara yang baik, susila, loyal terhadap negara dan sebagainya. Semua itu merupakan kewajiban moral yang harus ada pada setiap warga negara, sebagai modal pokok untuk membentuk kehidupan bernegara dan berpolitik dengan baik, yang dapat memakmurkan, menentramkan dan menyejahterakan.<sup>10</sup>

Adapun alasan penulis memilih pemikiran Bahtiar Effendy karena beliau merupakan tokoh pakar dalam bidang politik yang telah melahirkan banyak karya terutama tema agama dan politik, Effendy juga pernah menjadi Guru Besar Ilmu Politik di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2006 dan menjabat sebagai Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah pada periode 2015-2019. Rekam jejak intelektualitasnya berkonsentrasi pada bidang politik dan agama mulai dari kelulusan sarjananya di IAIN pada tahun 1986, kemudian menyelesaikan pendidikan Master pada program Asia Tenggara di Ohio University di Amerika Serikat, sampai meraih gelar doctor pada Departemen Ilmu Politik, Ohio State University di Amerika Serikat dengan disertasinya yang berjudul "*Islam and the State: The Transformation of Islamic Political Ideas and Practices in Indonesia*" yang

---

<sup>9</sup> Bahtiar Effendy, *Jalan Tengah Politik Islam: Kaitan Islam, Demokrasi, dan Negara Yang Tidak Mudah*, (Jakarta: Ushul Press, 2005), h. 325-332.

<sup>10</sup> Burhanuddin Salam, *Etika Sosial: Asas Moral Dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), h. 111.

kemudian diterbitkan menjadi sebuah judul *Islam dan Negara: transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*.

### **Menautkan Etika, Moralitas, dan Politik**

Beberapa ahli seperti kaum machiavellisme berpendapat bahwa antara etika dan politik terdapat jurang pemisah yang lebar, sehingga mereka menganggap keduanya tidak dapat disatukan. Masing-masing mempunyai kepentingannya sendiri. Etika dimaksudkan sebagai seperangkat nilai untuk menuntun kehidupan ke arah yang baik, dengan cara baik, dan untuk tujuan-tujuan baik. Sedangkan politik walaupun tujuan utamanya adalah sebagai instrumen untuk ikut membuat kehidupan manusia terasa lebih nyaman, di tengah dinamika kehidupan yang penuh dengan perbedaan dan persaingan tetapi dalam praktiknya, politik berisi sarat akan hal-hal yang menyebarkan, penuh dengan intrik, pengkhianatan dan tak jarang adanya permainan dengan cara *zero-sum-game*.<sup>11</sup>

Dari persoalan di atas ini maka menurut Bahtiar di sinilah letak perlunya suatu politik dibungkus dan dijiwai oleh nilai-nilai etis, sehingga dinamika yang menyertai kehidupan politik tidak semata-mata diarahkan untuk merealisasikan gagasan *who, gets what, when, how* (siapa mendapat apa, kapan dan bagaimana). Alih-alih seperti itu, politik dimaksudkan untuk disamakan dengan tugas-tugas lain dalam hidup, menjadi sesuatu yang penuh kejujuran dan kualitas manusia yang baik. Sehingga politik bukanlah sesuatu yang berkutat pada soal kekuasaan belaka.<sup>12</sup>

Menurut Bahtiar, politik tidak berdiri sendiri, ia erat kaitannya dengan *interplay* tiga unsur, yakni politik, ekonomi, dan kekuasaan. Ketiga unsur itu bila tidak dibentuk dan dipengaruhi oleh nilai-nilai etis, alih-alih menjadi obat mujarab,

---

<sup>11</sup> *Zero-sum-game*, merupakan jenis permainan dengan pola “penyelesaian menang-kalah” (*win-lose solution*). Di mana jika satu pihak menang, maka pihak lain pasti kalah. Jika satu pihak memperoleh keuntungan, maka itu merupakan harga yang harus dibayar oleh pihak lain (lihat Anas Yusuf, *Revitalisasi Kerjasama Regional dan Internasional Di Bidang Penegakkan Hukum Guna Meningkatkan Hubungan Pemerintah dan Pemerintah Daerah Dalam Rangka Keutuhan NIKRI*, (Kertas Karya Perorangan (Taskap): Lembaga Krtahanan Nasional RI, 2012) H. 23.

<sup>12</sup> Bahtiar Effendy, *Jalan Tengah Politik Islam: Kaitan Islam, Demokrasi, dan Negara Yang Tidak Mudah*, (Jakarta: Ushul Press, 2005), h. 328

isu-isu tersebut tidak hanya akan menempatkan suatu negara dalam kekacauan permanen, tetapi bisa lebih buruk dari itu.

Adapun contoh dari pernyataan di atas seperti apa yang terjadi di negara Indonesia, ketika rakyatnya ramai-ramai berusaha mengubur Orde Baru agar bisa menikmati kebebasan sehingga bisa hidup lebih baik. Ternyata setelah presiden Soeharto mundur pada tahun 1998, kebebasan memang mulai dirasakan, tetapi kebebasan itu ternyata tidak identik dengan kehidupan yang lebih baik yang ingin dibangun karena terjadi tindak korupsi, kecurangan dalam berpolitik, adanya permainan *zero-sum-game* di setiap kontes politik, dan mereka yang dulu sebelum masa reformasi dielu-elukan untuk memperbaharui kepemimpinan justru kini menjadi bagian dari masalah itu. Kedua hal itu – kebebasan dan menuju kehidupan yang lebih baik – mungkin menjadi faktor penting agar kita bisa membangun sesuatu yang lebih baik. Namun kenyataannya, kedua hal itu tidak cukup untuk menuntun masa depan yang membanggakan. Krisis sosial-ekonomi, politik dan keamanan masih saja menjadi persoalan utama kita.

### **Demokrasi yang Baik**

Menurut Bahtiar salah satu cara untuk menguatkan dan memperdalam demokrasi adalah dengan menilai proses dan praktik demokrasi yang berlangsung beserta capaian-capaian prosedural dan substansialnya. Hal ini akan memudahkan dalam proses mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perkembangan demokrasi.<sup>13</sup>

Bahtiar memandang bahwa langkah ini diperlukan mengingat masih banyak hal yang harus dievaluasi dalam membenahi demokrasi. Contoh kecilnya adalah seperti tindakan elite politik yang memperlakukan demokrasi sebagai instrumen untuk memperoleh keuntungan yang bersifat jangka pendek. Demikian untuk mencapai tujuan, mereka membuat aturan dan kebijakan yang barangkali tidak bertentangan dengan prinsip demokrasi tetapi ikut menyebabkan berlangsungnya sistem dan praktik politik yang tidak koheren dan menciptakan anomali, sehingga tujuan demokrasi sulit terwujud.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Bahtiar Effendy, *The state of Our Democracy: Menata Ulang Gagasan dan Praktik Demokrasi Di Indonesia*, (Jakarta: UIN Press, 2009) h. 27-28

<sup>14</sup> Bahtiar Effendy, *The state of Our Democracy: Menata Ulang Gagasan dan Praktik Demokrasi Di Indonesia*, (Jakarta: UIN Press, 2009) h. 28

### **Konplikalitas Banyak Partai**

Menurut Bahtiar mendirikan jumlah partai yang banyak pada negara demokrasi bukan merupakan manifestasi kebebasan. Justru hal itu merupakan kebablasan dalam memahami demokrasi, yang mengakibatkan roda pemerintahan berjalan tidak efektif.<sup>10</sup> Menurut Bahtiar demokratis atau tidaknya suatu pemerintahan bukan didasarkan oleh jumlah partai yang ada, melainkan karena ada hegemoni pemerintah yang menutup ruang kebebasan dalam mengekspresikan politik.<sup>11</sup> Salah satu contohnya seperti apa yang terjadi di Indonesia. Pemerintah Orde Baru menjadikan Golkar sebagai mesin politik Orde Baru. Awalnya Golkar merupakan aliansi militer, birokrasi sipil, serta golongan fungsional lainnya. Menjelang pemilu juga ada rancangan dari pemerintah agar partai-partai besar tidak menang. Jajaran militer dan birokrasi juga secara langsung maupun tidak diarahkan untuk mendukung Golkar. Dan pada akhirnya pada tahun 1977, terjadi fusi (penyederhanaan) partai – partai-partai berhaluan Islam digabungkan menjadi PPP, partai-partai yang nasionalis dan non-Islam digabungkan menjadi PDI, sedangkan Golkar tetap berdiri sendiri. Hal ini berbeda karena walaupun jumlah partai telah disederhanakan tetapi terdapat hegemoni dari pihak pemerintah, sehingga persaingan politik menjadi tidak sehat.

Bahtiar menjelaskan lebih lanjut bahwa pasca pengunduran diri presiden Soeharto yang menganut sistem otoritarianisme Orde Baru, masyarakat merasa terbebaskan dan berhak mengartikulasikan kepentingan politik mereka. Dalam hal ini ada kegairahan pada diri mereka untuk mendirikan partai politik, sehingga terjadilah pendirian partai dalam jumlah yang banyak. Atas euforia kebebasan tersebut telah membangkitkan semangat publik, khususnya para elite politik untuk berpolitik. Namun yang disayangkan karena euforia tersebut juga yang menghalangi kerasionalitas mereka dalam mempertimbangkan hal-hal penting lainnya seperti seberapa banyak kebebasan yang diperlukan? Termasuk dalam hal ini adalah jumlah dari partai politik yang dibutuhkan.<sup>15</sup>

### **Sikap Menang Kalah pada Peserta Pemilu dan Kaitannya dengan Demokrasi**

---

<sup>15</sup> Bahtiar Effendy, *The state of Our Democracy: Menata Ulang Gagasan dan Praktik Demokrasi Di Indonesia*, (Jakarta: UIN Press, 2009) h. 29



Menurut Bahtiar, demokrasi itu tidak hanya sekedar perangkat struktural saja, tetapi terdapat perangkat kultural. Salah satu dari tema kultural demokrasi ini adalah persoalan sikap kalah-menang dalam pemilu. Hal ini menjadi sesuatu yang penting bagi pengembangan kehidupan demokrasi.<sup>16</sup>

Menurut Bahtiar salah satu sikap demokratis, yakni persoalan menyikapi kalah-menang dalam pemilu adalah suatu hal yang penting. Ia tidak hanya merefleksikan Kualitas demokrasi (*democratic quality*) yang ada pada sebuah masyarakat tersebut, melainkan lebih penting dari itu ia dapat menunjukkan apakah sebuah komunitas politik tersebut sanggup menerima prinsip-prinsip demokrasi atau tidak. hal itu disebabkan karena ada hubungan yang inheren antara pemilu dengan demokrasi.<sup>17</sup>

Dari pernyataan di atas, baik dan buruknya peserta pemilu pada sistem demokrasi itu dapat dilihat dari kualitas berdemokrasinya (*democratic quality*) yang ada pada masyarakat tersebut. Dalam menilai suatu demokrasi tidak saja berisi unsur struktural saja melainkan unsur kultural yang salah satunya adalah sikap menang-kalah peserta pemilu pada kontes politik.

Dari pernyataan di atas, baik dan buruknya peserta pemilu pada sistem demokrasi itu dapat dilihat dari kualitas berdemokrasinya (*democratic quality*) yang ada pada masyarakat tersebut. Dalam menilai suatu demokrasi tidak saja berisi unsur struktural saja melainkan unsur kultural yang salah satunya adalah sikap menang-kalah peserta pemilu pada kontes politik.

Dalam pemilu, menang-kalah adalah hasil akhir dari pemilu yang tidak bisa dihindari. Bisa saja justru yang terjadi adalah hal-hal yang tidak diinginkan bersama. Menanggapi hal demikian itu menurut Bahtiar kenyataan ini harus diselesaikan melalui mekanisme dan dengan menggunakan instrumen yang bersifat damai (*non-violent*). Menurut Bahtiar kesepakatan-kesepakatan yang dinegosiasikan merupakan cara terbaik dalam hal ini. Sehingga budaya “berbicara” harus lebih dikembangkan daripada “berkelahi”. Dalam perspektif politik makna

---

<sup>16</sup> Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001) h. 227

<sup>17</sup> Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001) h. 227

demokrasi, hal semacam itu mencerminkan moralitas ideologi- politik tertentu bagi para pelakunya.

Bahtiar menjelaskan bahwa Prancis, Italia, Jepang, Jerman Barat, dan sejumlah negara di Amerika Tengah bisa jadi contoh yang baik dalam mengambil pelajaran terkait hal di atas, karena mereka mengtransformasikan ke dalam kehidupan sosial-ekonomi dan politik yang demokratis melalui cara- cara *imposition*. Menurut Bahtiar juga, walaupun kita tidak bisa melakukan imposisi-imposisi yang sebanding dengan mereka untuk memperkaya modal sosial kehidupan demokrasi kita. Namun, kita tidak boleh juga bersifat *indeferent*, hanya mengandalkan *the course of nature* untuk memainkan perannya. alih-alih hal itu diterapkan secara bersama-sama, kita harus melakukan tekanan-tekanan sosial kepada diri kita sendiri, dan utamanya kepada elite politik nasional karena dengan kelompok sosial-politik mereka, terlibat dalam proses kompetisi “perebutan” kekuasaan, bahwa sikap sportif untuk menerima kemenangan dan kekalahan itu perlu; mengembangkan *mutual trust* itu penting. Hal itu dilakukan di dalam konteks untuk membangun tradisi dan kepercayaan para aktivis dan pelaku politik agar mereka lebih bersedia “berbicara” daripada “berkelahi”, agar mereka bersedia menyelesaikan seluruh persoalan yang mereka hadapi secara demokrasi.<sup>18</sup>

## Kesimpulan

Corak pemikiran etika politik Bahtiar Effendy lebih condong kepada aliran deontologi, dikarenakan dalam pengidentifikasian nilai-nilai etikanya berdasarkan aturan-aturan, prosedural, dan kewajiban. Hal ini dapat terlihat dari poin-poin pemikirannya terkait etika politik, yaitu: Pertama, penautan etika dan moralitas dengan politik. Menurut Bahtiar terdapat urgensi untuk menautkan kedua unsur itu pada politik, baik itu dari nilai-nilai keagamaan maupun tradisi luhur pada suatu masyarakat itu sendiri. Untuk menautkan antara etika dan moralitas dengan politik dibutuhkan kesadaran akan tindakan-tindakan politik yang menyimpang dari nilai-nilai etika dan moralitas. Setelah kesadaran itu diperoleh maka langkah selanjutnya adalah memutus lingkaran setan, dengan tidak mengulangi tradisi-tradisi politik

---

<sup>18</sup> Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam: Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001) h. 238

lama yang menyimpang. Jadi, maksudnya ialah membawa nakhoda pemerintahan ke arah yang lebih baik dan sehat merupakan kewajiban bagi elite politik. Selaras dengan itu, Bahtiar berpendapat bahwa politik adalah instrumen untuk membuat kehidupan manusia merasa lebih nyaman di tengah dinamika perbedaan dan persaingan dalam kehidupan.

### Daftar Pustaka

- Abdullah, Amin “dalam pengantar”, Thilhatul Choir & Ahwan Fanani (editor), *Islam dalam Berbagai Pembacaan Kontemporer*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Adriyanti, Devi. *Sekularisme Sebagai Dasar Konseptualisasi: Telaah Atas Disertasi Noorhaidi Hassan, Bahtiar Effendy dan Masdar Hilmy Yang Memakai Pendekatan Ilmu Sosial Terhadap Politik Islam di Nusantara*, Jurnal IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia Volume 3 Nomor 1 2013.
- Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Ali Fachry dan Bahtiar Effendy *Merambah Jalan Baru Islam: Rekonstruksi Pemikiran Islam Indonesia Masa Orde Baru*, Bandung: Mizan. 1986.
- Al Suyuthi, Imam. *Tarikh Khulafa’: Sejarah Para Penguasa Islam*, Jakarta: Darul Khathab Al-Ilmiyah, 2018 cet. Ke 14 Terj. Samson Rahman.
- Aman, *Sejarah Indonesia Masa Kemerdekaan 1945 – 1998*, Yogyakarta: Ombak, 2015
- Amin, Muhammad, *Pemikiran Politik Al-Mawardi*, Jurnal Politik Profetik Volume 04, No. 2 Tahun 2016.
- Arif R, Masykur, *Buku Pintar Sejarah Filsafat Barat*, Jakarta: IRCiSoD, 2013.
- Armani, Armaidly, *Lahirnya Konsep Negara Sekular Dalam Pemikiran Barat*, Yogyakarta: Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Jurnal Filsafat Seri 16, 1994.
- Audi, Robert (editor), *The Cambridge Dictionary of Philosophy*, New York: Cambridge University Press, 1995.
- Azhar, Muhammad, *Filsafat Politik: Perbandingan Antara Islam dan Barat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Azikin, Andi, *Makna Otonomi Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Era Reformasi*, Jurnal MP (Manajemen Pemerintahan) Vol. 5, No. 1/Juni 2018.
- Badruddin, *Akhlaq Tasawuf*, Serang: IAIB Press, 2015.
- Bagus, Lorens, *Kamus Filsafat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.
- Bawazir, Tohir. *Jalan Tengah Demokrasi: Antara Fundamentalisme dan Sekularisme*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- BE, *Repolitikasi Islam: Pernahkah Islam Berhenti Berpolitik?*, Bandung: Mizan, 2000.
- Bertens, K, *Etika*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994.
- Black, Antony, *Pemikiran Politik Islam: Dari Masa Nabi Hingga Masa Kini*, (Jakarta: Serambi, terj. Abdullah Ali & Qomaruddin SF, 2006.
- Budiardjo, Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Dahlan, Abdul Aziz, *Pemikiran Falsafi Dalam Islam*, Jakarta: Djambatan, 2003.